

PENDEKATAN ANTROPOLOGI DALAM PENANGANAN KONFLIK OLEH KODAM XVIII KASUARI DI PAPUA BARAT

Irman Putra¹, Arief Fahmi Lubis²

^{1,2}Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat

Korespondensi : irmanputra_rincay@yahoo.com ; arieffahmilubis0@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat yang berada di daerah konflik akan merasa ketakutan, terancam dan mengungsi ke hutan-hutan. Pengerahan personel Kodam XVIII Kasuari bukanlah operasi militer melainkan mencari para pelaku tindak pidana terorisme karena telah menyebabkan ketakutan luar biasa pada masyarakat setempat hingga mengungsi ke dalam hutan sehingga Kodam XVIII Kasuari mendapatkan tugas tambahan untuk menormalisasi psikologis masyarakat Papua yang terkena konflik tersebut dengan pendekatan antropologi wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari subjek menggunakan pendekatan yuridis normatif sesuai ruang lingkup dan definisi masalah yang disebutkan di atas. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah, peneliti juga akan melengkapi secara yuridis politis dan historis. Penelitian ini secara bersamaan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan hukum normatif. Namun, dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap penyelidikan hukum normatif, dan penyelidikan hukum empiris berfungsi sebagai informasi tambahan. Kodam XVIII Kasuari selalu berusaha menghilangkan kebudayaan masyarakat pegunungan Arfak yang menjadikan kegiatan sehari-hari berbenturan dengan tindakan kriminal atau kejahatan seperti senjata api sebagai mas kawin dengan berbagai cara pendekatan antropologi. Pendekatan tersebut membantu masyarakat Papua Barat untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh para prajurit sebagai bagian dari operasi teritorial dalam hal penggalangan serta pembinaan, sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat, serta menegakkan hukum nasional di lingkungan masyarakat Papua Barat.

Kata kunci : Antropologi, Konflik, Kodam XVIII, Papua Barat

PENDAHULUAN

Insiden penyerangan kelompok bersenjata di wilayah Papua Barat menyebabkan masyarakat sekitar merasa ketakutan, terancam dan mengungsi ke hutan-hutan. Pihak Pemerintah dan Kodam XVIII Kasuari menyerukan kepada masyarakat yang masih mengungsi agar kembali ke rumah atau kampungnya masing-masing. Penambahan personel Kodam XVIII Kasuari di sana bukanlah operasi militer melainkan mencari para pelaku tindak pidana terorisme karena telah menyebabkan ketakutan luar biasa pada masyarakat setempat hingga mengungsi ke dalam hutan. Menghadapi situasi tersebut, bagaimanakah strategi Kodam XVIII Kasuari dalam menangani konflik di wilayah Papua Barat.

Sebagaimana uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana Penetapan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sebagai Kelompok Separatis Teroris. (2) Bagaimana Pendekatan Adat Sesuai Tradisi Masyarakat Setempat Sebagai Pendekatan Antropologi.

METODE

Penelitian ini untuk mengkaji subjek menggunakan pendekatan yuridis normatif sesuai ruang lingkup dan definisi masalah yang disebutkan di atas. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada, peneliti juga akan melengkapi dengan yuridis politis dan historis. Untuk mempertimbangkan masalah utama penelitian ini, peneliti secara bersamaan menggunakan metode penelitian hukum normatif¹ serta hukum empiris². Namun penelitian ini fokus pada penyelidikan hukum normatif, dan penyelidikan hukum empiris berfungsi sebagai informasi tambahan.

Menyesuaikan dengan identifikasi serta ruang lingkup permasalahan di atas, bahan hukum primer³, bahan hukum sekunder⁴, dan bahan hukum tersier digunakan dalam pendekatan yuridis normatif. Sedangkan studi empiris dilakukan melalui pengumpulan data dengan wawancara dan observasi di 4 (empat) daerah kota/kabupaten yang mewakili 7 (tujuh) suku besar lingkungan dalam masyarakat adat papua, 4 (empat) tipe kepemimpinan, dan sebaran geografis di Papua Barat. Selain itu, peneliti telah melakukan berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kompetensi mendalam di bidang hukum perdata, hukum tata negara, dan terutama hukum adat.

Peneliti akan menggunakan jenis data yang mencakup data primer dan sekunder terkait konstitusi. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data sekunder meliputi hasil penelitian berupa laporan, buku, dokumen resmi, dan lain-nya.

DISKUSI

Berdasarkan Undang-undang Tahun 2018 Nomor 5 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Tahun 2003 Nomor 15 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 2002 Nomor 1 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. KKB yang marak terjadi di Tanah Papua membuat pemerintah menciptakan regulasi baru. Terakhir, ada Perpres Tahun 2021 Nomor 7 mengenai Rencana Aksi Nasional Penanggulangan serta Pencegahan Terorisme Berbasis Kekerasan. Perpres ini diharapkan agar bisa menjadi instrumen yang ampuh dalam rangka mencegah dan memberantas aksi terorisme di Indonesia. Publik dan pemerintah menduga apa motif sehingga KKB mampir di Tanah

¹ Penelitian hukum normatif merupakan studi tentang hukum melalui penelitian data sekunder atau bahan pustaka. Studi hukum normatif ini meliputi: (1) sejarah hukum; (2) studi tentang sistematika hukum; (3) survei pada tingkat sinkronisasi horizontal dan vertikal; (4) perbandingan undang-undang; dan (5) studi tentang prinsip-prinsip hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum UI, 1979), hal. 15. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13-14.

² Penelitian hukum empiris merupakan studi hukum melalui penelitian terhadap data primer, yaitu data yang diterima langsung dari masyarakat setempat. Kajian hukum empiris semacam itu disebut juga kajian hukum sosiologis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian...*, op. cit., hal. 12 dan hal. 14.

³ Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang memuat pengetahuan ilmiah baru atau yang sudah ada maupun pemahaman baru tentang suatu fakta atau gagasan (ide) yang diketahui. Bahan-bahan ini meliputi: (a) laporan penelitian; (b) kertas kerja simposium, konperensi, seminar, lokakarya, dan lainnya; (c) buku; (d) tesis atau disertasi; (e) majalah; (f) laporan teknis; dan (g) paten. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian...*, op. cit.,

⁴ Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang memuat informasi tentang bahan primer seperti: (a) penerbitan pemerintah; (b) bibliografi; (c) indeks; (d) abstrak; dan (e) bahan acuan lainnya. Ibid.

Papua Barat. Sebagian kalangan meyakini bahwa tindakan kriminal KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di masyarakat Papua didasarkan pada enam latar belakang dengan motif yang berbeda. Yaitu, pertama balas dendam pribadi atas terbunuhnya orang tua atau saudara saat terjadi bentrok, dan kedua motif ekonomi, dikarenakan pada umumnya mereka adalah pengangguran. Ketiga, menikmati keberadaan kelompok dan diri sendiri. Keempat, digunakan untuk mengganggu lawan politik dalam pilkada. Kelima, mendapatkan perhatian untuk mendapatkan proyek bisnis. Keenam, digunakan untuk penyitaan emas.

a. Penetapan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sebagai Kelompok Separatis Teroris.

Latar beragam motif di atas, seluruhnya terjerumus dalam air keruh masalah sosial. Papua tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga rawan masalah sosial lainnya, tidak salah lagi apabila hal tersebut terjadi di tanah Papua. Kemiskinan, politik, kekeluargaan dan pengangguran adalah problem yang nampak di mata masyarakat. Dari perspektif penulis, Poblema Papua atau masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), juga disebabkan oleh segelintir orang yang menentang Republik Indonesia.⁵

Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam), mengatakan lebih dari 92% masyarakat Papua mendukung NKRI. Ini terjadi setelah diumumkannya status teroris KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua. Mahfud MD juga mengatakan di luar masyarakat yang mendukung NKRI, melalui organisasi KKB ada beberapa orang yang diam-diam memberontak. Menurutnya, aksi pemberontakan tersebut merupakan tindakan teroris. "Beberapa orang diam-diam melakukan pemberontakan untuk melakukan gerakan separatis, yang tindakannya adalah gerakan terorisme" dari konferensi pers yang dikutip dari saluran Youtube Kementerian Politik dan Keamanan Hukum.⁶

Kegiatan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan TPN-OPM/ KKB-KSB harus aktif bekerja sama dengan aparat setempat dan tokoh masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk menghindari jatuhnya korban warga sipil tak bersalah. KKB yang terjadi di Papua tentu membuat kenyamanan warga sekitar sangat meresahkan. Segala kegiatan bebas yang sebelumnya berlangsung setiap hari kini terhalang tembok pembunuhan dan kekerasan oleh KKB. Masyarakat sipil, Polri dan TNI merupakan objek yang menjadi utama serangan dari tindakan pembunuhan dan kekerasan oleh KKB di Papua. KKB berhasil menghantui masyarakat di sana dengan aksi kriminal mereka. Tindakan kriminal yang dilakukan KKB sangat berpengaruh buruk pada psikis, emosional dan mental masyarakat Papua Barat.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan organisasi KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) Papua sebagai teroris. Penetapan ini tidak terlepas dari kegiatan KKB yang cenderung melakukan kejahatan seperti tindak kekerasan berat dan brutal serta pembunuhan. Tindakan kelompok ini telah memperburuk kondisi masyarakat di Papua Barat.

b. Mendahulukan Pendekatan Adat Sesuai Tradisi Masyarakat Setempat Sebagai Pendekatan Antropologi.

Bahkan jika pemerintah telah menetapkan TPN-OPM/ KKB-KSB sebagai organisasi teroris, penegakan hukum harus tetap mengedepankan pendekatan persuasif yang dipadukan dengan pendekatan masyarakat adat sesuai tradisi setempat sebagai Pendekatan Antropologi dibanding pendekatan keamanan. Selain itu, lembaga keamanan setempat harus terus memberikan kesempatan kepada pimpinan daerah untuk menjalin komunikasi dan mengajak

⁵ <https://www.kompasiana.com/lusita39417/5daf17b70d82307085793402/papua-kaya-sumber-daya-alam-tetapi-kemiskinan-tinggi>

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/30/14270581/mahfud-mit-bukan-gerakan-keagamaan-tapi-gerakan-kejahatan>

masyarakat pendukung TPN-OPM/ KKB-KSB untuk kembali mendukung dan fokus pada NKRI.⁷

Pendekatan antropologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang manusia, dimana dalam kajiannya mengedepankan 2 (dua) konsep penting yaitu⁸ Holistik dan Komperatif. Penelitian antropologi terkait erat dengan sejarah dan penjelasan mendalam yang menjelaskan manusia melalui pengetahuan dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu kehidupan (alam), dan humaniora. Antropologi juga menggunakan penelitian ilmu antarbudaya untuk menyoroti dan menjelaskan perbedaan antara kelompok manusia dalam hal budaya material, tingkah laku sosial, pandangan hidup dan bahasa. Salah satu kebudayaan masyarakat pegunungan Arfak Manokwari menjadikan senjata api sebagai mahar kawin. Kodam XVIII Kasuari selalu berusaha menghilangkan kebudayaan masyarakat pegunungan Arfak yang menjadikan senjata api sebagai mahar kawin dengan berbagai cara pendekatan seperti memberi dukungan materi untuk membantu mengembangkan daerah dan berperan sebagai guru di sekolah-sekolah terpencil di Papua. Prajurit Kodam XVIII Kasuari juga banyak yang bertugas sebagai tenaga medis untuk membantu pengarah kesehatan dan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Pendekatan tersebut membantu masyarakat Papua Barat untuk sepenuhnya dilakukan oleh para prajurit sebagai bagian dari operasi teritorial dalam hal penggalangan dan pembinaan sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat menyerahkan senjata api yang disimpan dan kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat adat yang berpotensi menimbulkan konflik dan rasa tidak aman.⁹

Banyak pengamat di dalam maupun luar negeri mengapresiasi peran TNI. Apa yang terjadi sekarang adalah *unintended consequence* dari dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Memang, kejelian petugas lapangan membaca kondisi dan situasi sosial penduduk Papua Barat berhasil mengidentifikasi masalah dan tidak mengarah pada kerusuhan berujung konflik. Keberanian pimpinan Kodam XVIII Kasuari yang didukung kepolisian menjadi kunci sukses membendung berbagai hoax.

Beberapa contoh pendekatan antropologi lainnya, Kodam XVIII Kasuari menginisiasi melalui kegiatan ketahanan pangan kampus-kampus di wilayah Papua Barat, tidak hanya membantu adik-adik mahasiswa untuk menemukan nutrisi dan sayuran alternatif yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga bertujuan untuk memungkinkan pembelajaran bagi penduduk di wilayah Papua Barat.¹⁰

Kemudian, persatuan dan kesatuan bangsa akan di capai melalui pendekatan antropologi dengan program pembinaan Kerukunan Umat Beragama antara TNI khususnya TNI AD, KBT (Keluarga Besar TNI), dan lingkungan masyarakat. Aktivitas Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dirancang untuk membantu prajurit TNI, KBT (Keluarga Besar TNI), Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama untuk benar-benar memahami pentingnya toleransi beragama. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan solidaritas dan kerukunan antar umat beragama agar tidak terjadi konflik sosial antar umat beragama yang dapat mengganggu kesatuan dan persatuan negara.¹¹

⁷ <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/08/pola-pendekatan-panglima-tni-soal-penanganan-konflik-papua-dapat-apresiasi>

⁸ Leonard Seregar. 2002. Antropologi dan Konsep Kebudayaan. Universitas Cendrawasih Press. Jayapura.

⁹ <http://porosakyatnews.com/2021/12/07/ini-yang-dilakukan-kodam-kasuari-ke-personil-bko-teritorial-koramil-persiapan-gelombang-iii/>

¹⁰ <https://papua.inews.id/berita/kodam-xviii-kasuari-dan-unipa-kolaborasi-buat-program-ketahanan-pangan-mahasiswa>

¹¹ <https://predikatnews.com/2021/08/kodam-xviii-kasuari-gelar-pembinaan-kerukunan-umat-beragama/>

Lalu, pemerintah daerah harus didorong untuk mengaktifkan atau memprakarsai sistem keamanan desa. Dengan cara membuat prangkat keamanan desa yang mengikutsertakan tokoh pemuda dan masyarakat setempat. Pelaksanaan pendekatan keamanan melibatkan proses pendekatan keamanan yang nyata dan harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekedar program dan kebijakan. Pemerintah daerah diharapkan serius dan bekerja sama menangani pengungsi. Jumlahnya pengungsi terus bertambah dengan merebaknya kekerasan di berbagai wilayah.¹²

Dalam wilayah tertentu di Indonesia, sistem hukum adat juga harus diimplementasikan pada hukum negara, karena hukum adat adalah dokumen hukum asli Indonesia atau realitas hukum dari prinsip-prinsip yang benar-benar berlaku di masyarakat. Kodam XVIII Kasuari juga selalu melaksanakan pendekatan antropologi dengan komunikasi aktif dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) setempat, selalu berdiskusi bersama para pemuka adat agar terjalin hubungan batin yang kuat antara Kodam XVIII Kasuari dan masyarakat. Lembaga Masyarakat Adat merupakan hukum yang hidup dilingkungan masyarakat sehingga hubungan tersebut dilakukan untuk meyelaraskan visi misi yang belum sinkron atau belum tepat diterima oleh masyarakat Papua Barat.

KESIMPULAN.

1. Sebagian orang percaya tindakan kriminal dari KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di masyarakat Papua didasarkan pada enam latar belakang dengan motif berbeda yaitu, pertama balas dendam pribadi atas terbunuhnya orang tua atau saudara saat terjadi bentrok, dan kedua motif ekonomi, dikarenakan pada umumnya mereka adalah pengangguran. Ketiga, menikmati keberadaan kelompok dan diri sendiri. Keempat, digunakan untuk membingungkan lawan politik dalam pilkada. Kelima, mendapatkan perhatian untuk mendapatkan proyek bisnis. Keenam, digunakan untuk penyitaan emas.
2. Pemerintah Indonesia telah menetapkan organisasi KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua sebagai teroris. Penetapan ini tidak terlepas dari kegiatan KKB yang cenderung melakukan kejahatan seperti tindak kekerasan berat dan brutal serta pembunuhan. Tindakan kelompok ini telah memperburuk kondisi masyarakat di Papua Barat.
3. Pendekatan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, dalam kajiannya mengedepankan 2 konsep penting yaitu Holistik dan Komperatif. Kajian antropologi sangat memperhatikan sejarah dan penjelasan menyeluruh untuk menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial ilmu hayati (alam) dan juga humaniora. Antropologi juga menggunakan kajian ilmu lintas-budaya sebagai penekanan dan menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dalam perspektif perilaku sosial, material budaya, pandangan hidup dan bahasa. Salah satu kebudayaan masyarakat pegunungan Arfak Manokwari menjadikan senjata api sebagai mahar kawin. Kodam XVIII Kasuari selalu berusaha menghilangkan kebudayaan masyarakat pegunungan Arfak yang menjadikan senjata api sebagai mas kawin dengan berbagai cara pendekatan seperti memberi bantuan fisik untuk membantu pembangunan daerah sekaligus menjadi guru di sekolah-sekolah terpencil di pelosok Papua. Banyak juga prajurit Kodam XVIII Kasuari yang bertugas sebagai tenaga medis membantu penyuluhan kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pendekatan tersebut membantu masyarakat Papua Barat di lapangan dalam kerangka operasi teritorial dalam aspek penggalangan dan pembinaan sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat menyerahkan senjata api yang disimpan dan

¹² | Gede A.B Wiranata, 2002, Antropologi Budaya, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, HAL. 12.

kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat adat yang berpotensi menimbulkan konflik dan rasa tidak aman.

Ke depan, para prajurit TNI perlu memperoleh pembekalan antropologi wilayah Papua supaya memahami lingkungan dan budaya masyarakat Papua. Pendekatan sosial budaya dan dialog antar pihak yang memiliki kepentingan harus dilaksanakan secepatnya sebagai langkah preventif dari penanganan konflik di wilayah Papua Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- I Gede A.B Wiranata, 2002, Antropologi Budaya, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Leonard Seregar. 2002. Antropologi dan Konsep Kebudayaan. Universitas Cendrawasih Press. Jayapura.
- <https://www.kompasiana.com/lusita39417/5daf17b70d82307085793402/papua-kaya-sumber-daya-alam-tetapi-kemiskinan-tinggi>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/30/14270581/mahfud-mit-bukan-gerakan-keagamaan-tapi-gerakan-kejahatan>.
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/08/pola-pendekatan-panglima-tni-soal-penanganan-konflik-papua-dapat-apresiasi>
- <http://porosrakyatnews.com/2021/12/07/ini-yang-dilakukan-kodam-kasuari-ke-personil-bko-teritorial-koramil-persiapan-gelombang-iii/>
- <https://papua.inews.id/berita/kodam-xviii-kasuari-dan-unipa-kolaborasi-buat-program-ketahanan-pangan-mahasiswa>
- <https://predikatnews.com/2>